

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



**RECONSTRUING URBAN MUSLIM ENTREPRENEUR PROGRAM
ON VOLUNTARY ALMSGIVING: Deconstruction, Social Theology and Plurality**

Roma Ulinnuha

**GEN-Z MUSLIMS, SOCIAL MEDIA AND FORMLESS-SPIRITUAL:
An Explorative Study of Mosque Youth in Medan City**

Ziaulhaq Hidayat

**THE LIFE OF THE NIQAB AND SIRWAL;
Phenomenological Study of Family Power Relations to Stigma**

Mohammad Maulana Iqbal

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

JURNAL
SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA:
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial
Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Zuly Qodir

Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,
Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

DAFTAR ISI

RECONSTRUING URBAN MUSLIM ENTREPRENEUR PROGRAM ON VOLUNTARY ALMSGIVING: Deconstruction, Social Theology and Plurality	
Roma Ulinnuha	1
GEN-Z MUSLIMS, SOCIAL MEDIA AND FORMLESS-SPIRITUAL: An Explorative Study of Mosque Youth in Medan City	
Ziaulhaq Hidayat.....	17
THE LIFE OF THE NIQAB AND SIRWAL; Phenomenological Study of Family Power Relations to Stigma	
Mohammad Maulana Iqbal.....	33
MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001	
Luqman Al Hakim & Dudung Abdurrahman.....	49
TRANSFER KAPITAL: Studi Praktik Ulama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat	
Maulana Janah	65
TIONGHOA MUSLIM DI MADURA: Asimilasi Budaya dan Interaksi Sosial	
Akhmad Siddiq & Mutamakkin Billa.....	87

TRANSFER KAPITAL: Studi Praktik Ulama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Maulana Janah

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya

maulanajanah@unikcps.ac.id



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transfer modal yang dimiliki oleh ulama dalam praktik pengentasan kemiskinan. Ulama sebagai pemimpin agama merupakan kaum terdidik yang memiliki ciri khas dalam dunia pesantren. Ulama memiliki habitus tersendiri yaitu suatu dunia yang identik dengan nilai-nilai agama yang melekat dalam dirinya. Dalam konteks itu, bagaimana ulama melakukan tindakan dan praktik kehidupan dalam dunia yang terus mengalami kemajuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara induktif hasil penelitian dapat terlihat dari fenomena yang dijelaskan. Penelitian ini disusun melalui pengumpulan data yang sistematis, dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap sumber data. Pengambilan data diselesaikan di Pesantren Al-Amin Kota Tasikmalaya. Adapun kerangka berpikir penelitian menggunakan teori habitus untuk melihat praktik yang dilakukan oleh ulama dalam pengentasan kemiskinan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ulama memiliki modal sosial ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik. Masing-masing Modal dapat ditransfer ke dalam modal yang lain. Bentuknya melalui pemberdayaan masyarakat yang berada dilingkungan pesantren. Selanjutnya, ulama juga mengakumulasi modal agama dan modal lainnya yang semakin mengokohkan posisi ulama dalam ranah sosial. Praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ulama merupakan suatu proses melipatgandakan kebiasaan dengan kekuatan modal yang diakumulasi dalam lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya proses interaksi antara orang yang ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Modal, Ulama, Kemiskinan

Abstract

This study is carried out to explain a capital transfer owned by Ulama in act of eradicating poverty. Religious leaders known as ulama are intelligent individuals with traits common to the pesantren. They have their own habits, which include living in an environment where Islamic ideals are ingrained. In such contexts, there is something to do with how do the ulama go about their daily lives in a society that is always changing. This study uses a qualitative method. Inductively, it is possible to deduce the research findings from the described phenomena. The data were collected systematically through observation, interviews, and recording of data sources. The data collection took place at the Al-Amin Islamic Boarding School in Tasikmalaya City. The habitus theory is used in the study framework to examine the methods of ulama to alleviate poverty. According to the study's findings, the ulama possess socioeconomic, cultural, and symbolic capital. Transferring one capital into another is possible. In the pesantren setting, community empowerment serves as the format. Additionally, the ulama amassed material wealth in the form of religious capital and other types of capital, which improved their standing in society. The process of multiplying habits with capital strength that is gathered in the social environment that allows for a process of interaction between individuals who play a role in poverty alleviation is how the clergy practice of it.

Keywords: Capital, Ulama, Poverty



PENDAHULUAN

Ulama merupakan tokoh yang sangat dihormati di dalam masyarakat Islam. Ulama dianggap sebagai pemimpin spiritual yang memberikan pemahaman dan pembinaan agama yang berguna bagi masyarakat. Menurut pendapat lain ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. (Esposito, 2002; Nasution, 2002). Bahkan, ulama disebut sebagai *men of religious learning and prestige*. (Humphrey, 1999, 187).

Tugas dan fungsi ulama dalam lingkungan sosial, yaitu melakukan pembinaan akhlak kepada masyarakat Islam. Tujuannya untuk benar dalam ucapan dan tindakan. Akhlak tersebut, diwujudkan dalam bentuk ucapan dan tindakan (*qudwah*) yang baik. Selain itu, ulama juga membimbing masyarakat agar mampu melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih bermanfaat. Mereka memberikan motivasi agar masyarakat memiliki etos kerja yang tinggi.

Selanjutnya, terkait dengan hubungan sosial antara ulama dan masyarakat, merupakan peran penting yang harus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Hubungan sosial itu sangat bermanfaat untuk membangun kerjasama antara ulama dan masyarakat. Di samping itu, untuk menjaga agar tradisi dan nilai-nilai Islam tetap terpelihara. Peran dan hubungan sosial tersebut menjadi pembentuk sistem dalam pola kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat menjadi penentu budaya. (Jannah 2015, 166-167)

Dalam konteks negara dan bangsa, ulama memiliki fungsi dan kedudukan yang cukup luas, namun fungsi dan kedudukannya berbeda-beda di setiap negara Islam. Misalnya, kedudukan ulama dapat berfungsi menjadi penasehat dan sekaligus sebagai *qodi* (hakim). (Marthin 2004, 703). Oleh sebab itu, secara teologis ulama dipandang sebagai sosok pewaris para nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak heran, jika ulama kemudian menjadi sumber legitimasi (*legitimacy*) dari berbagai peran keagamaan yang sebenarnya juga hampir dalam semua aspek kehidupan. (Farid 2003, 197)

Sejalan dengan argumentasi di atas, kedudukan ulama sebagai pemimpin agama sangat berpengaruh dalam pembentukan nilai-nilai agama di dalam masyarakat Islam. Ulama dijadikan sebagai tokoh yang mampu memberikan solusi atas persoalan yang terjadi, dan karena pengaruhnya yang sangat besar itu, seorang ulama di tengah masyarakat menjadi rujukan. (Osman 2008; Khalid 2014)

Keterlibatan ulama dalam konteks pembangunan merupakan bentuk dari partisipasi yang semestinya dilakukan oleh ulama itu sendiri. Ulama biasanya menjadi penggagas dan pelaku lembaga swadaya masyarakat. Mereka bergerak untuk memberikan bimbingan dan mediator dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dalam kiprah ulama melalui pesantren yang dipimpinnya. Melalui lembaga keagamaan dan pendidikan tersebut, ulama mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada Pendidikan dan pengembangan masyarakat Islam. Dan secara sosiologis, pengaruhnya menyebar ke dalam aspek kehidupan masyarakat. (Nasution 1995; Burhanudin 2003).

Oleh karena itu, kajian tentang praktik ulama memiliki irisan dengan kajian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya kajian yang menyatakan bahwa fungsi sosial ulama sebagai pialang budaya (*cultural broker*). (Geertz, 1960, 229). Ulama membangun relasi dengan kekuatan sosial lain untuk memediasi dan menyaring nilai sesuai dengan tujuan. Kemudian kajian yang memposisikan ulama sebagai *entrepreneur politik* dalam sistem sosial, yakni ulama sebagai salah satu penggerak perubahan sosial. Kajian tersebut mengoreksi pendapat Geertz, bahwa ada pergeseran peran dan fungsi ulama dari sebatas mediasi menjadi pelaku perubahan sosial. (Horikoshi 1987, 241-245). Berikutnya, kajian yang berusaha mencari titik temu antara Geertz dan Horikoshi. Kajian ini mengatakan bahwa *entrepreneur* tidak berarti menolaknya sebagai *cultural broker*. Ia melihat bahwa tindakan ulama dalam konteks sosial sangat bervariasi bergantung situasi sosial yang menyertainya. Ulama dapat berperan di domain keulamaanya dan dapat berperan keluar dalam relasi sosial antarkepentingan. Ulama menempati titik silang di antara dunia *profan* dan dunia *religius*. (Dirdjosanjoto, 1999, 250)

Berbagai hasil kajian tentang ulama di atas menunjukkan bahwa praktik ulama berperan dalam berbagai sektor kehidupan sosial. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana praktik ulama dalam mengakumulasi modal untuk pengentasan kemiskinan? Apakah modal tersebut akan semakin mengokohkan posisi ulama dalam struktur sosial masyarakat atau sebaliknya? Oleh karena itu, penulisan penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif dengan kerja lapangan (studi kasus). Kerja lapangan dilakukan di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu satu tahun dari Desember 2018 sampai dengan Desember 2019.

Pengambilan data dan informasi dicatat dan dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Sumber informasi berdasarkan data primer (ulama dan masyarakat sekitar pesantren)

yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan berbagai modal ulama yang bergerak dalam ranah sosial. Selanjutnya, penelitian ini juga untuk menganalisa relasi posisi biner peran dan fungsi ulama, yakni subjek yang melakukan perubahan sosial. Tujuan berikutnya adalah untuk menjelaskan proses transfer modal ulama dalam arena pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir, untuk melihat pandangan masyarakat terkait praktik ulama tersebut.

PEMBAHASAN

Transfer Modal: Praktik Ulama dalam Pengentasan Kemiskinan

Beberapa tahun terakhir, para ulama terlibat dalam usaha melawan kemiskinan dan isu-isu terkait. Melalui advokasi dan aktivisme mereka, para tokoh agama ini berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dan dampaknya. Di antara langkah penting yang dilakukan oleh mereka, yaitu dengan membangun lembaga pendidikan pesantren dan ekonomi. Tujuannya untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

Aktivisme ulama dalam masyarakat bergantung pada kondisi sosial yang menyertai mereka. Peran dan kedudukan mereka, ada yang fokus membuat fatwa-fatwa keagamaan, menjadi penasihat pemerintahan, atau lebih dari itu mereka menjadi hakim untuk menyelesaikan persoalan umat Islam. (Mostarom 2014, 563). Selain itu, seorang ulama juga tidak hanya menjadi pigur di dalam pesantren tetapi juga menjadi tokoh yang dihormati di luar pesantren. Masyarakat menganggap bahwa sosok ulama dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan sosial. (Shokheh 2011, 151).

Berbagai pandangan di atas akan dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Dalam kajian ini, akan dianalisa aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh ulama. Dan pada prosesnya setiap ulama memiliki praktik yang berbeda dan bervariasi sesuai dengan karakteristik keberadaan ulama itu sendiri.

Kategori ulama yang dibahas dalam kajian ini yaitu; *pertama*, ulama yang mengembangkan kegiatan pesantren salafiah; *kedua*, ulama yang memiliki pondok pesantren dengan jumlah santri ± 1000 orang ke atas; dan *ketiga*, ulama yang memiliki kekayaan dalam bentuk kegiatan ekonomi dan wirausaha. Dari kategori tersebut, aspek pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam dua hal, yaitu melalui jalur pendidikan dengan berbagai kondisi yang ada di dalamnya, seperti tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana prasarana. Berikutnya, pengembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti jaringan kerja, penyerapan tenaga kerja, sistem pengupahan, dan jasa.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta, kedudukan ulama di Pesantren Al-Amin dapat dilihat dari sisi kepemilikan lembaga pendidikan dan unit usaha. Secara khusus, pesantren dilengkapi dengan lembaga pendidikan formal. Sedangkan unit usaha sebagai penunjang lembaga pendidikan tersebut. Kegiatan ekonomi yang ditekuninya berupa garmen dan bordir, travel haji, dan rumah makan. (Wawancara RZ, 2019)

Selanjutnya, terkait dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, dapat dilihat dalam gaya hidup sehari-hari. Misalnya, miliki fasilitas hidup yang mapan, seperti mobil, rumah, tanah yang luas, serta tempat usaha dan bisnis. Dengan melihat realitas ini, ulama tidak hanya menguasai seperangkat ilmu agama tetapi juga penguasaan praktik ekonomi dan bisnis. Mereka merupakan pelaku bisnis atau

seorang *entrepreneur* sejati. (Dirdjosanjoto, 1999, 250).

Seorang ulama dengan berbagai *privelege* yang dimilikinya memungkinkan menjadi mitra utama pemerintah dalam membantu dan membimbing tujuan dari pembangunan di Kota Tasikmalaya. Hal ini bisa terjadi sepanjang ada kerjasama yang intens serta persesuaiannya dengan kebijaksanaan pembangunan, dengan tetap memperhatikan fungsi masing-masing.

Realitas di atas memberi makna bahwa ulama dengan segala sistem yang melekat dalam dirinya, baik sistem yang ada dalam umat Islam (dunia pesantren) yang bersifat *homogen* dan cenderung *eksklusif* atau sistem yang ada di luar pesantren (eksternal) yang bersifat *heterogen* dan cenderung terbuka, mengalami persentuhan yang sangat intim antara dua sistem kehidupan yang berbeda tersebut.

Oleh karena itu, persentuhan antara ulama dan realitas sosial yang terus mengalami perubahan-perubahan secara kontinu membuka ruang-ruang tertentu untuk mewujudkan peran konstruktif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, realitas sosial bisa diwujudkan melalui suatu pemikiran yang membingkai pola tindakan individu, sehingga realitas sosial itu bisa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Sejauh ini, posisi dan eksistensi ulama dalam konteks pengentasan kemiskinan dengan memberikan dukungan kepada orang miskin melalui peran strategisnya. Ulama memberikan bimbingan dan nasihat tentang doa, ikhtiar, dan takdir Tuhan yang diberikan kepada manusia. Disamping itu, mereka juga memberikan pemahaman tentang akses kepada sumber daya kehidupan seperti sandang, pangan, dan papan. Selain hal tersebut, ulama turut serta menciptakan kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat agar saling tolong menolong dan saling membantu.

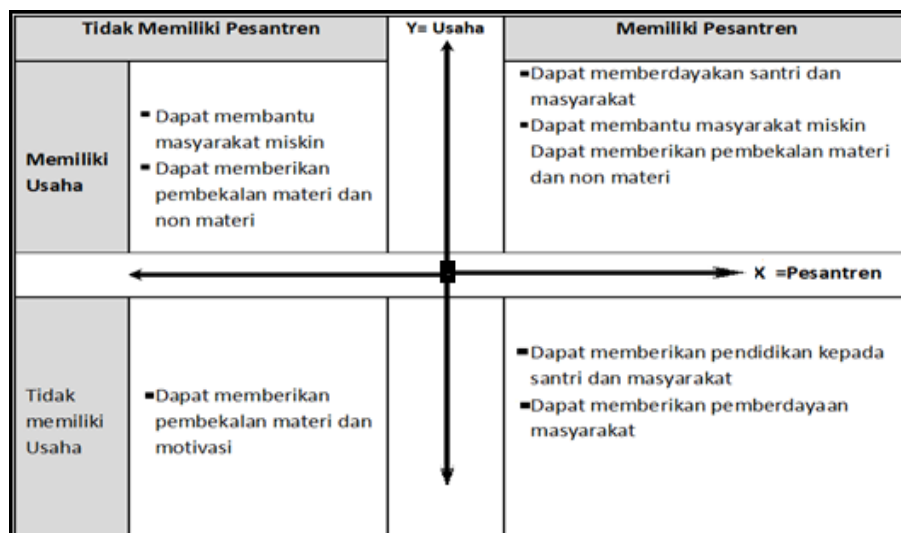
Oleh karena itu, bentuk dan variasi tindakan ulama dalam konteks pengentasan kemiskinan, yaitu dengan menunjukkan komitmen nyata meskipun jalan yang ditempuh di antara mereka berbeda-beda. Perwujudannya bisa berupa pemberian materi dan lapangan pekerjaan. Semua komitmen itu diorientasikan dalam kerangka membangun dan memelihara umat. (Wawancara RZ, 2019)

Kenyataan selanjutnya, keberadaan ulama di Pesantren Al-Amin tidak hanya mengelola pesantren. Namun, ia membangun bisnis dan kemitraan dengan pihak-pihak tertentu di luar pesantren. Ulama membangun relasi antar kepentingan dengan berbagai komponen masyarakat. Relasi dengan para pebisnis, para dermawan, politisi maupun dengan pemerintahan. Secara praktis, ulama dengan segala simbol keulamaannya mempengaruhi masyarakat yang berada di luar pesantren.

Karena itu, dari berbagai data yang telah disampaikan, sosial modal ulama dapat dianalisa dalam kategori ulama yang memiliki modal kultural (pesantren) dan memiliki modal ekonomi (uang dan kekayaan), yang kemudian modal tersebut dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Bagi ulama yang hanya memiliki modal kultural (pesantren), pemberdayaan terfokus melalui pendidikan. Sedangkan ulama yang hanya memiliki modal ekonomi dikembangkan untuk kegiatan pemberdayaan usaha. Kemudian, bagi ulama yang tidak memiliki modal kultural dan modal ekonomi, pemberdayaan masyarakat hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi.

Uraian tentang sosial modal ulama tersebut di atas, selanjutnya akan dijelaskan melalui gambar kuadran di bawah ini. Kuadran ini menjelaskan posisi masing-masing ulama yang dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di dalam maupun yang ada di luar pesantren. Secara lebih rinci, sosial modal ulama dapat dilihat dalam Gambar.1 tentang Kuadran Modal Ulama.

Gambar 1. Kuadran Modal Ulama



Berdasarkan keterangan kuadran di atas, khususnya ulama yang memiliki modal dalam bentuk usaha nyata dan lembaga pendidikan tentu bisa lebih banyak membantu masyarakat. Modal yang dimiliki mampu diolah sebagai sumber kekuatan yang manfaatnya diberikan kepada masyarakat. Selain itu, modal tersebut dapat pula mendatangkan suatu keuntungan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi ulama itu sendiri.

Selanjutnya, modal ulama dapat dibuktikan dengan kepemilikan lembaga usaha, tetapi tidak memiliki pesantren. Ulama-ulama semacam ini adalah yang terbiasa besar di panggung-panggung ceramah atau tabligh. Ulama yang berada pada posisi ini dapat membantu masyarakat dan warga miskin termasuk memberikan pembekalan materi dan non materi. Begitupun sebaliknya, bagi ulama yang mempunyai pesantren dan tidak mempunyai lembaga usaha.

Kekuatan Modal Ekonomi

Ketersediaan modal sebagai sumber daya yang bisa digerakkan merupakan basis dari pemberdayaan. Modal ibarat pelicin sebagaimana pelumas yang melancarkan mesin dalam sebuah kendaraan. Dari pengamatan penulis, menunjukan bahwa modal yang dimiliki oleh ulama cukup signifikan baik dalam aspek dunia pendidikan keagamaan maupun aspek perkembangan dunia bisnis yang sering disebut di kalangan pesantren dengan istilah ekonomi. Dalam perkembangannya, pendidikan keagamaan dan ekonomi selalu berhubungan erat.

Sebagaimana diketahui, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki para pengrajin dan pengusaha. Sektor ini merupakan sentral usaha kreatif yang berdiri secara mandiri. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki visi perindustrian dan perdagangan. Contohnya, industri kreatif yang ada di Kota Tasikmalaya menjadi *icon* dan ciri khas dari budaya kerja yang kreatif.

Pada kasus penelitian ini ditunjukkan bahwa ulama berbisnis dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan ekonomi kreatif. Pendidikan bisa bernilai bisnis paling menjanjikan yang bersifat jangka panjang. Di sisi lain, ekonomi kreatif yang mereka bangun merupakan penguatan untuk eksistensi ulama dan pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, dalam subbab ini, akan dijelaskan dan digambarkan perkembangan dunia usaha yang dimiliki oleh ulama serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang ada di dalam lingkungan pesantren maupun di luar pesantren.

Berdasarkan informasi dari seorang warga di lingkungan Pesantren Al-Amin. Bapak MS (60 tahun), warga Kampung Cukang, RT 02, RW 05 bertubuh kecil dan kurus. Namun, ia masih tampak segar dan gesit. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh harian lepas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia dibantu sama anak dan istrinya yang ikut bekerja. Pada saat peneliti datang ke rumahnya, peneliti diterima dengan ramah di ruang depan rumahnya. (Wawancara MS, 2019)

Pada saat wawancara akan dimulai tampak istri MS sedang bekerja dengan anaknya memotong pola baju bordir dengan menggunakan solder listrik. Istrinya mempersilahkan kepada peneliti untuk masuk ke rumahnya serta bertanya tentang maksud dan tujuan kepada peneliti. Peneliti menjelaskan bahwa kedatangan ke rumah Pak MS adalah ingin bertanya terkait dengan peran ulama dalam memberdayakan masyarakat. Saat wawancara dilakukan, ia menjelaskan dengan mengungkapkan perihal kebenaran tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh ulama. Menurut ulama yang ada di Pesantren Al-Amin banyak membantu dan memberdayakan masyarakat di kampung ini. Bentuknya permodalan, bedah rumah, dan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, KH. WN menurut MS melakukan pengembangan pesantren sebagai sebuah institusi keagamaan yang berbasis pada pengembangan usaha. Beliau telah lama membangun pemberdayaan yang intens dengan lingkungan setempat. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui penguatan industri kerajinan bordir yang telah menjadi identitas masyarakat Kecamatan Kawalu. Bahkan, KH. Wawan Nawawi mengembangkan pesantren tersebut menjadi tempat sentral industri bordir yang terintegrasi dengan perusahaan garmen.

Eksistensi ulama di pesantren tersebut membantu membangun jejaring perekonomian masyarakat sehingga tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pada kasus tersebut, ulama di Pesantren Al-Amin, secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Contoh dalam kasus utang piutang, pihak ulama dan pesantren melunasi utang warga yang terjerat pinjaman rentenir. Tidak hanya soal utang, kepedulian selanjutnya adalah memberikan bantuan permodalan dan program bedah rumah warga yang tidak layak huni. Sampai saat ini rumah yang sudah dibedah dan diperbaiki telah mencapai enam puluh rumah. Selain itu, ia juga memberikan bantuan insentif tambahan untuk guru madrasah atau guru sekolah agama di daerah sekeliling pesantren. (Wawancara NS, 2019; ES, 2019).

Oleh karena itu, hal ini merupakan program dan langkah kongkrit dengan melakukan upaya penyerapan tenaga kerja dalam bidang pengerjaan bordiran. Program tersebut, secara perlahan dapat memotong angka kemiskinan di daerah tempat pesantren berdiri. Menurut pengelola program pemberdayaan dari pihak Pesantren Al-Amin, sampai saat ini angka kemiskinan dapat ditekan menjadi tiga persen dari jumlah penduduk yang ada di sekitar pesantren. Keadaan masyarakat di

daerah tersebut rata-rata secara ekonomi terbantu. (Wawancara RZ, 2019)

Selanjutnya, data yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi ulama dan masyarakat sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan melaksanakan pola kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan syarat hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pihak pesantren (ulama) bersifat harmonis di antara keduanya.

Kenyataan di atas, menunjukkan bahwa pihak pesantren (ulama) tidak terasing dari lingkungan masyarakat. Pola semacam ini merupakan pembangunan komunitas (*community development*) yang diarahkan untuk kemandirian suatu komunitas yang berbasis pada kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam konteks ini, kearifan lokal merupakan wujud dari kreativitas masyarakat di bidang industri bordiran yang khas sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat setempat.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh ulama di Pesantren Al-Amin secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian problem masyarakat setempat. Secara substansial, upaya pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui strategi mendasar, yaitu dengan pola pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta aktif setiap individu masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan perekonomian.

Selanjutnya, terkait dengan produk bordir yang dihasilkan Pesantren Al-Amin. Sampai saat ini, produk bordir telah masuk ke pasar berskala internasional. Diantaranya Inggris, Timur Tengah, Saudi Arabia dan Sebagian wilayah Afrika. Setiap bulan kegiatan ekspor dilakukan dua kali sebanyak ± 30.000 potong bordir dengan kualitas berstandar tinggi. (Wawancara KH. WN, 2019)

Oleh karena itu, pihak pengelola pabrik garmen dan bordir dituntut disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan. Standar tersebut diterapkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari dalam dan luar negeri. Pabrik garmen dan bordir digerakkan oleh lima ratus karyawan. Setiap karyawan dipekerjakan di sentral produksi garmen dengan standar tinggi yang dilengkapi mesin-mesin garmen berteknologi tinggi dan terkoneksi jaringan komputer. (Wawancara KH. WN, 2019)

Perusahaan border tersebut, merupakan lahan ibadah dengan tujuan untuk menopang berdirinya pesantren. Pada awalnya, perkembangan bordir masih menggunakan alat manual (*hand made*). Namun, seiring dengan perkembangan waktu serta majunya ilmu pengetahuan, kegiatan bordir sudah menggunakan mesin yang dioperasikan dengan komputer sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak. Pengerjaan garmen dan bordir ditangani oleh karyawan yang sudah terampil dan profesional. Target produksi garmen harus mencapai seribu potong gamis setiap harinya. Jumlah sebesar itu merupakan tuntutan permintaan dari pasar dalam negeri dan luar negeri. (Wawancara KH. WN, 2019)

Realitas tentang usaha ulama di atas, menunjukkan bahwa ulama memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan bisnis. Hal ini, tentu saja sangat membantu secara langsung pada perekonomian masyarakat. Karyawan berasal dari masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pesantren. Realitas ini menunjukkan bahwa ulama sangat berperan dalam usaha meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Di Kecamatan Kawalu pekerjaan bordir merupakan bagian dari budaya dan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, para pengusaha bordir membuat suatu jaringan kerja yang kuat di antara mereka. Sehingga terbentuklah suatu kerja sama yang baik dan persaingan yang sehat di antara para pengusaha bordir yang berada di Kecamatan Kawalu. (Wawancara YA, 2019)

Selanjutnya, proses penyelesaian produk tidak seluruhnya dikerjakan oleh mesin. Salah satunya proses memasang manik-manik pada baju yang dikenal dengan istilah '*ngamute*' (bahasa Sunda). Sejak puluhan tahun, kegiatan '*ngamute*' melibatkan tenaga masyarakat yang dibayar sesuai dengan banyaknya hasil pekerjaan. Biasanya, kegiatan ini dilakukan oleh para ibu rumah tangga sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah uang belanja. Kegiatan '*ngamute*' harus sesuai dengan standar perusahaan. Sistem kerjanya membentuk suatu jaringan kerja yang mirip dengan multi level marketing. (Wawancara YA, 2019)

Hasil pembahasan di atas, menunjukkan bahwa modal modal ulama berinteraksi secara dialektis dalam ranah sosial dan ekonomi secara langsung. Karena itu, ulama merupakan figur yang terlibat secara praktis sebagai aktor sosial ekonomi. Sejalan dengan pandangan tersebut, di dalam lingkungan masyarakat semakin besar pengaruh seseorang atau suatu kelompok semakin tinggi pula kedudukannya di dalam struktur sosial; semakin tinggi kedudukan orang, semakin besar pengaruh dan hak-hak atau *privilege* yang dimilikinya. Begitu besarnya pengaruh seseorang atau suatu kelompok sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain (Zulkifli, 2018; Nasution, 2017; Nuraini, 2016)

Kekuatan Modal Kultural

Modal kultural yang melekat dalam diri ulama adalah lembaga pendidikan pesantren. Dalam perkembangannya, ulama memadukan dua keilmuan, yaitu antara *sains* sebagai ilmu pengetahuan dan keimanan sebagai *aqidah* sehingga dapat berjalan seirama. Dua hal tersebut menjadi landasan utama. Dan pada akhirnya, ilmu dan keimanan dapat menjadi jembatan yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. (Wawancara KH. WN, 2019)

Selanjutnya, dalam pengembangan modal kultural, pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) pada satu sisi, sedangkan di sisi lain bertujuan membangun karakter manusia (*character building*). Sehingga, ketika kedua hal tersebut terwujud dapat menghasilkan manusia yang mandiri secara pendidikan dan ekonomi. Saat ini, pesantren telah bertransformasi menjadi salah satu lembaga penyedia sumber daya manusia. (Adawiah 2022, 198)

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh ulama melalui jalur pendidikan sebagai upaya membentuk mental dan karakter masyarakat. Hal ini merupakan agenda yang realistis agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan. Karena itu, proses membina manusia agar memiliki produktivitas yang tinggi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena, pendidikan merupakan aset paling fundamental yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Oleh karena itu, salah satu fokus pemberdayaan yang dilakukan oleh ulama yang berada di Pondok Pesantren Al-Amin melalui jalur pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah konkret dalam membangun masyarakat agar memiliki kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan oleh ulama tidak hanya sebatas memberikan pengajaran dan pendidikan di bidang agama saja, tetapi mereka telah mengembangkan suatu kurikulum dengan menambahkan muatan lokal, yaitu pengajaran kewirausahaan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa peserta didik perlu dibekali ilmu yang bersifat praktis agar mereka bisa menghadapi kemajuan zaman yang terus berkembang. (Wawancara KH. WN, 2019)

Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh ulama melalui pondok pesantren telah memasuki suatu fase, bahwa pesantren juga bisa sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Sebab pada praktiknya, ulama melakukan terobosan penting dalam merespons kemajuan dan perkembangan zaman. Kenyataan ini bisa dilihat melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Misalnya, penguasaan ilmu komputer dan teknologi lainnya. Ilmu tersebut sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Hampir semua pesantren pola semacam ini telah terjadi di Kota Tasikmalaya. (Wawancara KH. WN, 2019)

Kenyataan di atas menjadi alasan yang rasional apabila dihubungkan dengan modal kultural ulama. Modal kultural tersebut menjadi tindakan dalam praktik pengentasan kemiskinan. Praktik-praktik yang dilakukan ulama tersebut berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaannya melalui program yang dijalankan dengan masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Modal kultural tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk modal pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan.

Modal kultural dalam pendidikan merupakan jati diri pesantren yang sangat melekat dalam diri ulama itu sendiri. Biasanya, terkait dengan tradisi pembelajaran yang merujuk langsung pada sumber-sumber otoritatif melalui kitab kuning. Selanjutnya, tentang dakwah. Pada posisi ini, ulama menjadikan pesantren sebagai institusi paling depan dalam menyebarkan dan memberikan pemahaman agama Islam yang toleran dan moderat. Ajaran Islam yang mulia dapat disampaikan oleh kaum ulama dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Bahkan, dalam konteks dakwah, ulama dengan modal kulturalnya bisa membangun suatu hubungan yang intens dalam memelihara kearifan lokal.

Terakhir, pemberdayaan masyarakat. Di antara poin penting pemberdayaan yang dilakukan oleh ulama yaitu, ulama membangun hubungan yang intens, dan tidak memisahkan diri dari lingkungan masyarakat umum. Ulama yang berada di pesantren merupakan satu kesatuan yang *inklusif* yang mampu memberikan jawaban atas persoalan masyarakat. Karena itu, ulama dengan segala modal kultural yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Melalui jalinan kerja sama yang dibangun dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Implementasi atas hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks yang lain, hubungan timbal balik yang dilakukan oleh ulama dan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk penguatan sosial budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat supaya mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja untuk memaksimalkan kualitas hidup.

Realitas tersebut di atas lahir dari kenyataan budaya kerja masyarakat berdasarkan pada sikap gotong royong dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan kebudayaan orang Indonesia yang bertumpu pada nilai yang menjadi acuan, yaitu: nilai ekonomi, estetis, solidaritas, kuasa, teori, dan nilai agama. Variasi nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam melakukan amal perbuatannya selalu dilandasi oleh orientasi nilai tersebut. (Sudarma 2008, 36-37)

Selanjutnya, ulama yang mengembangkan pesantren pada masa sekarang, dihadapkan pada pembangunan tiga fungsi penting sebagai landasan pemberdayaan masyarakat. Pertama, sebagai transmisi pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*); kedua, sebagai pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*); dan ketiga, sebagai fungsi pembinaan calon-calon ulama (*reproduction ulama*). (Azra 1998, 89)

Sejalan dengan hal tersebut di atas, ulama yang berada di Pondok Pesantren Al Amin memiliki misi untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang bereputasi. Kenyataan ini di dukung oleh upaya membina generasi Islam supaya memiliki keahlian dalam penguasaan tradisi ilmu-ilmu Islam dalam upaya melahirkan kader-kader ulama yang handal.

Selanjutnya, proses pendirian Pesantren Al-Amin merupakan salah satu pesantren yang didirikan oleh keluarga yang bergerak dalam dunia usaha dan bisnis. Cikal bakal pesantren ini berawal dari sebuah perusahaan Bordir Ciwulan. Pada awalnya merupakan lembaga pendidikan bordir (LPB) dan berdiri pada tahun 1965 yang dirintis oleh Almarhum H. Zarkasih dan Hj. Maryam. (Wawancara YA, 2019)

Induk dari perusahaan bordir tersebut adalah PT. Ciwulan Bordir yang sekarang menjadi perusahaan butik. Kemudian didirikan pula PT. Ciwulan Putra Mandiri yang bergerak dalam bidang industri garmen dan industri bordir. Pada masa-masa awal, pasangan suami-istri H. Zarkasi dan Hj. Maryam dikarunia lima anak, tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Keturunan mereka secara berturut-turut adalah Hj. Habibah (anak pertama), H. Amir (anak kedua), H. Undang (anak ketiga), K.H. Wawan Nawawi (anak keempat), dan yang terakhir adalah Hj. Iis Nafisah. (Wawancara KH. WN, 2019).

Keluarga besar ini, sejak lama bergerak dalam bidang bordir sampai mendapatkan penghargaan berupa upakarti dari Presiden Soeharto. Penghargaan atas dedikasi dan keuletan dalam membangun bisnis bordir serta mengajarkannya melalui lembaga pendidikan bordir (LPB) kepada masyarakat.

Pada waktu itu, H. Zarkasi memiliki banyak murid yang belajar dari berbagai daerah, seperti dari Gorontalo dan Pekalongan. Atas kesabaran dan keuletan mengajarkan bordir, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Penghargaan yang diberikan ia peroleh pada tahun 1986. Kemudian, pada tahun tersebut berdiri Yayasan Pendidikan Islam Ciwulan. Dari yayasan inilah cikal bakal transformasi dilakukan dengan mendirikan pesantren dan sekolah formal, tepatnya pada tahun 2000. (Wawancara RZ, 2019)

Sejak awal berdiri, para perintis Yayasan Pendidikan Islam Ciwulan memiliki keinginan dan cita-cita mendirikan sekolah formal yang berbasis pesantren. Sepeninggal para pendiri awal pesantren, K.H. Wawan Nawawi yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir selama sepuluh tahun diamanahi mengelola pesantren. Ia menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin.

Pondok pesantren tersebut bercorak salafiyah dengan mengajarkan kitab kuning yang dipadukan dengan pembelajaran umum. Di antara keunggulan dari pesantren Al-Amin, yaitu dalam bidang hafalan Alquran dan *entrepreneurship*. Sampai sekarang, santri yang telah lulus hafalan Alquran tiga puluh juz sebanyak dua puluh orang lulusan. Mereka telah diwisuda secara resmi oleh pihak pesantren. (Wawancara KH. WN, 2019).

Pesantren Al-Amin berdiri di atas tanah seluas empat hektar. Kondisi pesantren terintegrasi dengan perusahaan pabrik garmen sebagai basis perekonomian pesantren. Di dalam pesantren juga dilengkapi dengan sarana-sarana yang modern, seperti lapangan olahraga, kantin, dan pusat pelatihan tata busana berbasis pesantren.

Sampai saat ini jumlah santri tercatat kurang lebih seribu orang yang terdiri dari santri putra dan putri. Mereka terdaftar di sekolah formal SMP Islam Al-Amin dan Madrasah Aliyah Al-Amin. Para santri yang ingin tinggal di pesantren disediakan asrama yang layak dan memadai. Namun, bagi sebagian siswa yang ada di luar lingkungan pesantren, yang tidak mau tinggal di asrama, pihak pesantren menyarankan mereka hanya mengikuti pembelajaran sekolah formal saja. (Wawancara RZ, 2019)

Peserta didik di pesantren Al Amin tidak hanya belajar kitab kuning, tetapi juga mereka belajar tentang kemandirian ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Pesantren dilengkapi dengan fasilitas yang modern, serta unit usaha bordir yang dikembangkan secara terintegrasi.

Hal lain yang menjadi kelebihan pesantren tersebut, terkait peserta didik yang terkendala pembiayaan yang disebabkan dari keluarga kurang mampu, ulama di pesantren memberikan beberapa kemudahan. Bagi siswa yang sama sekali tidak mampu diberikan keringanan berupa pembebasan biaya sekolah berupa uang masuk dan iuran setiap bulannya. Hal ini diberikan dengan syarat peserta didik melampirkan surat keterangan dan rekomendasi dari yang berwenang. (Wawancara KH. WN, 2019)

Menyikapi kemampuan finansial peserta didik yang berbeda-beda, dilakukan subsidi silang dari perusahaan garmen dan bordir berupa beasiswa. Hal ini dibayarkan pada akhir tahun atau pada masa tutup buku perusahaan. Sebab, biasanya pada setiap tahun ada banyak siswa yang belum membayar kewajiban karena alasan keuangan. (Wawancara KH. WN, 2019)

Para ulama di pesantren ini memiliki visi yang mencerminkan jiwa dan kemajuan dari etos kerja berlandaskan nilai-nilai agama. Cita-cita dan impian besar mereka dirumuskan melalui visi misi yang unggul dalam ilmu agama dan sains. Sehingga, dapat terwujud keseimbangan antara kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional.

Sehubungan dengan visi dan misi tersebut, kurikulum pembelajaran dilengkapi dengan *entrepreneurship*. Disamping itu, untuk calon-calon ustadz dan calon cendekiawan muslim serta yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, diberikan pengetahuan secara makro. Namun, bagi mereka yang ingin langsung bekerja, pihak pesantren memberikan pengetahuan ilmu terapan. (Wawancara KH. WN, 2019)

Kekuatan Modal Simbolik

Terdapat banyak pandangan terkait modal spritual ulama sebagai potensi yang melekat dalam diri seorang ulama. Hal ini sejalan dengan pandangan Verter (2003) dalam Zulkifli yang membagi dua tipe modal agama, yaitu sistem simbolik agama (mitos-ideologi) dan kompetensi agama, hal ini dapat berarti penguasaan seperangkat pengetahuan dan praktik spesifik. (Zulkifli 2018, 75).

Pembahasan dalam subbab ini terkait dengan kedudukan seorang ulama tidak hanya berperan mengurus soal keagamaan semata, tetapi juga mengurus persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu, dalam pergaulan sosial, seorang ulama mempertaruhkan seluruh modal yang melekat dalam dirinya itu. Misalnya, modal simbolik yang dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan akan otoritas yang *legitimate* dari seluruh segmen masyarakat Islam. Hal ini berkaitan dengan kharisma. Pada titik tertentu, masing-masing modal dapat diakumulasi dan ditransfer ke dalam modal yang lain. (Zulkifli 2018, 76-77)

Selanjutnya, modal simbolik yang dimiliki oleh ulama dapat dilihat dari kepribadian dan kewibawaan seorang ulama. Masyarakat memandang, bahwa ulama diikuti karena memiliki keluhuran budi pekerti yang bersumber pada Alquran dan hadits. Hal ini merupakan modal yang dapat digunakan dalam pergaulan dengan masyarakat. Seorang ulama dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai seorang manusia, merupakan refresentasi nyata dari potret nilai yang ada dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut.

Memahami kepribadian dan kewibawaan ulama, bisa di lihat dalam dua dimensi, dimensi kekuatan dalam (*bathin*) dan dimensi kekuatan luar (*zhahir*). Dimensi *bathin* ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi keyakinan seorang ulama. Nilai tersebut melekat dalam diri ulama, sehingga menjadi sumber kekuatan dan kewibawaan ulama yang memancar dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dimensi *bathin* dan dimensi *zhahir* tersebut sebagai modal simbolik agar diakui sebagai ulama dengan segala otoritas keagamaan yang sah.

Selanjutnya, modal keagamaan merupakan seperangkat pengetahuan tentang agama yang diyakininya, menjadi jalan untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan sektor-sektor kehidupan dunia. Disamping itu, sebagai bentuk timbal balik, masyarakat memberi penghormatan yang tinggi terhadap ulama. Sebab, kiprah ulama dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam penanaman dan penjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memandang bahwa ulama sebagai orang berilmu yang dapat memberikan berkah.

Ulama dengan segala watak dan kepribadiaanya menjadi simbol yang memiliki otoritas agama dalam masyarakat Kota Tasikmalaya. Keberadaan ulama memiliki andil sebagai penjaga moral masyarakat dan pemerintah setempat. Kenyataan ini bisa dikatakan bahwa seorang ulama bisa menjadi mediator yang memberikan pandangan terkait dengan persoalan pembangunan, pemerintahan atau dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Salah satu ajaran agama Islam yang dijadikan dasar dalam pergaulan adalah ajaran tentang akhlak. Ajaran ini berkaitan dengan amalan tasawuf sebagai bentuk kelembutan jiwa dalam pergaulan antar manusia. Dengan ajaran ini, seorang ulama merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap saat. Agar suasana hatinya selalu dekat dengan Pencipta, caranya dengan memiliki amalan rutin untuk

mengolah jiwa (*dzauq*). Wirid dan dzikir merupakan amalan untuk meningkatkan kehidupan spiritual seseorang. (Dhofier 2011, 226-227).

Sumber kekuatan selanjutnya yang dimiliki oleh seorang ulama, yaitu kekuatan dimensi luar. Hal ini biasanya merupakan sesuatu yang tampak secara *zhahir* yang dapat dilihat oleh panca indra manusia. Dimensi luar inilah yang menjadi ciri khas seorang ulama. Sesuatu yang membungkus fisik seorang ulama seperti jubah, peci, bendi, sarung, sorban, dan alat tasbeih. Atribut luar tersebut, menggambarkan citra diri yang agamis dan islami.

Disamping itu, kekuatan simbol yang menjadi daya tarik dari kepribadian dan kewibawaan seorang ulama terkait dengan sumber-sumber dan kepemilikan harta benda yang dimiliki. Seorang ulama dengan segala sifat yang melekat sebagai manusia, ia memiliki kekayaan berupa aset tanah, dan kendaraan. Hal ini merupakan sumber kewibawaan yang berasal dari modal ekonomi dan menjadi pelengkap dalam tampilan diri seorang ulama.

Pada masa sekarang, seorang ulama memiliki basis ekonomi yang mapan. Rata-rata mereka pandai dalam mencari modal modal dengan cara membangun jaringan kerja dengan kalangan pengusaha, jaringan dengan kalangan politisi serta jaringan dengan kalangan ulama itu sendiri.

Sejalan dengan itu, tugas ulama dalam upaya memberikan bimbingan kepada masyarakat. Bimbingan yang diberikan dengan tujuan agar mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Sudah semestinya ulama berperan dalam menumbuhkan etos kerja yang tinggi agar masyarakat memiliki nilai kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Seperti bidang ilmu keagamaan dan ilmu mencari kekayaan. (Kahmad, 2006,139)

Dengan demikian, kekuatan modal simbolik yang dimiliki ulama merupakan kekuatan untuk menunjukan dan mendapatkan kepercayaan untuk mengkonfirmasi atau mengubah pandangan dunia, dan melalui kekuatan simbol tersebut ulama melakukan tindakan tertentu dalam kehidupan nyata. Karena itu, kekuatan simbol adalah produk dari perjuangan di mana masing-masing ulama bersaing untuk mendapatkan kepercayaan yang sah dari masyarakat.

PANDANGAN MASYARAKAT

Terkait fakta-fakta yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diperkuat dengan pembahasan tentang tindakan dan praktik ulama dalam bentuk pengembangan kegiatan pendidikan dan ekonomi. Pembahasan tersebut menunjukan bahwa ulama telah memainkan peranannya dalam pengembangan sosial ekonomi, agama, dan pendidikan.

Pengembangan dan inovasi yang dilakukan ulama dalam bidang pendidikan dan usaha, memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar lingkungan pesantren. Khususnya dalam bidang ekonomi atau dalam bidang kewirausahaan menjadi sarana dalam membangun kemandirian masyarakat, hal ini sesuai dengan jati diri dan jiwa pesantren. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berada di luar pesantren secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan mereka. (Wawancara, US, 2019)

Kenyataan tersebut di atas, seorang ulama secara berkelanjutan melakukan perbaikan melalui pendidikan berkualitas. Hal ini merupakan upaya memotong mata rantai kemiskinan. Dampak selanjutnya terkait terbukanya lapangan pekerjaan seperti kebutuhan tenaga pengajar, tenaga administrasi, pekerja bangunan, petugas kebersihan, pekerja cuci, tukang masak, petugas keamanan, petani yang menggarap lahan milik ulama, dan karyawan lembaga usaha milik pesantren.

Penjelasan selanjutnya, terkait keberadaan lembaga-lembaga sosial yang dimiliki oleh ulama. Lembaga ini mempunyai fungsi utama membantu perekonomian masyarakat. Misalnya, koperasi dapat membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha. Selain itu, masyarakat yang telah menghasilkan produk dapat bekerjasama dengan lembaga ekonomi yang dikembangkan oleh ulama. Kemudian untuk lembaga zakat, masyarakat bisa menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran modal modal ulama dalam bentuk Lembaga pendidikan dan unit usaha secara langsung memberikan dampak pekerjaan bagi masyarakat.

Selanjutnya, dampak dari lembaga pendidikan dan usaha yang dimiliki oleh ulama yaitu membentuk suatu model sistem yang saling menguatkan dalam tatanan sosial. Model sistem sosial mencakup kesatuan-kesatuan yang saling berinteraksi, masing-masing kesatuan memiliki bagian dan setiap kesatuan adalah bagian dari kesatuan-kesatuan yang lebih besar. Suatu sistem merupakan sesuatu yang kompleks dan terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan sehingga membentuk sistem jaringan kerja yang nyata yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu.

Pada sisi yang lain, sebagian masyarakat memberikan pandangan, bahwa selama ini ulama hanya mengurus urusan umat yang bersifat *spiritual* dengan menekankan pada aspek ibadah formal saja. Pada posisi ini ulama hanya terlibat dalam memberikan nasihat kepada umat dalam bentuk ceramah atau tabligh. Pemberian makna *profetik* tersebut hanya dibatasi dalam konteks pengajaran ajaran agama Islam yang bersifat normatif. Seorang ulama yang memerankan posisi ini terjebak dalam rutinitas yang kurang memberikan solusi atas problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat. Ajaran agama Islam tampak mati dan tidak hidup dalam dinamika kehidupan masyarakat, ia hanya mengurus persoalan yang ghaib saja, dan terkadang agama seolah-olah menjadi salah satu faktor 'penghambat' bagi kemajuan masyarakat.

Pada kasus penelitian ini, terdapat perbedaan kemampuan di antara para ulama. Meskipun demikian, usaha ke arah pemberdayaan masyarakat tetap dilakukan dengan melihat kemampuan dan kapasitas mereka masing-masing. Pada titik inilah masyarakat memandang bahwa ada para ulama yang secara langsung memberikan bentuk pemberdayaan dengan sosial modal yang dimilikinya, seperti modal lembaga usaha dan lembaga pesantrennya. Namun disisi lain, ada juga ulama yang melakukan secara apa adanya mengingat kemampuan modal yang mereka miliki kurang memadai dan terbatas.

Dengan demikian, pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan tidak berarti dan harus selalu dalam bentuk kebutuhan materi (meskipun materi sangat penting) tetapi juga bisa dengan memberikan pembinaan mental bagi masyarakat sekitarnya. Pelatihan dan pembinaan tersebut

dilakukan dalam upaya memberikan kesadaran bahwa kehidupan itu perlu perbaikan terutama dalam meningkatkan pola kehidupan ekonomi mereka.

Pada posisi di atas ini, seorang ulama hanya mampu melakukan pola pengentasan kemiskinan melalui jalan penguatan pengajaran dan pembinaan nilai-nilai agama bagi masyarakat, yang sifatnya hanya sebatas anjuran dan ajakan melalui media ceramah atau tabligh. Pola pemberdayaan dalam bentuk dakwah ini biasa menekankan pada penyampaian materi yang berkaitan dengan motivasi diri, syariah, akhlak, dan teologi.

Pandangan masyarakat selanjutnya, menyatakan bahwa ulama dalam konteks pengentasan kemiskinan lebih didasarkan pada hubungan kemanusiaan yang bersifat sementara, mereka memposisikan orang miskin sebagai bagian dari orang yang mesti dibantu tetapi hanya sebatas memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan kebutuhan hidup. Pada posisi ini, ulama banyak terlibat dan menjadikan santunan dalam bentuk donasi yang diberikan kepada orang-orang miskin, hanya saja mereka berhenti pada tahap tersebut. Bantuan yang bersifat santunan tersebut bersifat spontanitas dan temporer. Mereka tidak membangun program yang berkelanjutan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, bantuan dan pemberdayaan merupakan dua hal yang berbeda, dan di lapangan faktanya menunjukkan dua hal tersebut secara praktik dikerjakan berbeda. Satu sisi, ada ulama yang merasa sudah cukup dengan memberikan bantuan kepada orang-orang miskin tanpa harus memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Pemberian donasi atau santunan yang bersifat temporer tersebut menunjukkan ulama memposisikan orang miskin tersebut sebagai suatu objek yang pasif yang hanya bisa dibantu melalui sumbangan atau sedekah.

Berbeda dengan pandangan di atas, pandangan ini melihat bahwa ulama menjadi penggerak perubahan sosial dan memberikan jalan keluar bagi pengentasan kemiskinan. Pandangan dan Tindakan ulama mencerminkan suatu upaya untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri, dan karena itu ulama memposisikan masyarakat miskin sebagai manusia yang bisa diberdayakan. Ulama memposisikan orang miskin bukan sebagai orang yang lemah dan serba kekurangan melainkan sebagai orang yang memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan dan diberdayakan.

Pilihan artikulasi keberpihakan terhadap orang miskin tidak sekedar memberikan santunan dan donasi tetapi melakukan upaya mengangkat harkat martabat orang miskin agar bisa lebih produktif dan berdaya guna, pilihan artikulasi tersebut dapat terlihat dalam pemberdayaan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga usaha yang mereka kembangkan.

Pemberdayaan yang mereka lakukan merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam bentuk relasi usaha bisnis yang dilakukan oleh ulama. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa peran ulama menjadi bukti adanya pemberdayaan yang bersifat jangka panjang. Masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan banyak manfaat dari pemberdayaan tersebut.

Selanjutnya, terkait pandangan masyarakat yang berada di sekitar pesantren, ulama memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selama ini banyak para ulama yang memberikan pencerahan melalui ceramah-ceramah di masjid yang ada di lingkungannya dan mencoba melakukan upaya memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di lingkungannya terutama dalam

bidang-bidang ekonomi dan kemandirian.

Selanjutnya, seorang ulama dapat memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan pengentasan kemiskinan, tetapi cakupan dan jangkauannya yang berbeda-beda, misalnya dalam perekrutan pekerja, bantuan finansial, ataupun pembekalan *life skill* bagi masyarakat yang berada dalam jangkauan lembaga yang mereka miliki. Disamping itu, ulama merupakan kalangan masyarakat tertentu yang cenderung lebih mudah mendapatkan akses untuk berhubungan langsung dengan pemerintah, sehingga ulama dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. (Wawancara, HP, 2019)

Dengan demikian, setelah peneliti menjelaskan realitas tentang persoalan praktik ulama dalam pengentasan kemiskinan, maka dapat diperoleh beberapa hal yang menjadi pandangan masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap ulama. Pandangan masyarakat terhadap ulama secara lebih rinci dapat tergambar dalam penjelasan di bawah ini.

Kesalehan Sosial

Masyarakat memandang bahwa kesalehan ulama di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Kesalehan tersebut bisa dalam wujud kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Secara pribadi, seorang ulama memiliki tingkat kesalehan yang lebih tinggi, hal ini berbanding lurus dengan keilmuan yang dimilikinya. Kesalehan seorang ulama tercermin pada interaksinya dengan masyarakat, kepeduliannya yang tinggi terhadap kondisi masyarakat serta akhlak dan budi pekertinya menjadi rujukan bagi masyarakat yang ada disekitarnya.

Selanjutnya, dalam benak masyarakat, ulama merupakan pigur yang memiliki kekhasan tersendiri. Mereka adalah orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan luas apabila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu, ulama juga terbiasa mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat melalui majelis taklim, masjid, dan pesantren. Pada masa sekarang ulama juga menggalakan kegiatan ekonomi. Mereka membangun, membina, dan memberdayakan santri serta masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat memandang bahwa ulama merupakan kaum elit sosial yang mampu membina masyarakat agar menjadi individu yang berakhlak mulia, tangguh, serta dapat menjadi penengah atas masukan dan aspirasi masyarakat. Karena itu, seharusnya para pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan harus ada pengakuan atas peran kunci masyarakat dalam mengekspresikan makna, identitas, dan tujuan pembangunan. (Shihab, 2000; Sodik, 2013)

Pemecah Masalah

Seorang ulama memiliki otoritas keagamaan yang selama ini melekat dalam diri mereka. Hal ini dapat dilihat ketika ada persoalan, masyarakat pada umumnya lebih mudah mendatangi para ulama daripada birokrasi dan pemerintah, dalam menyelesaikan problem-problem sosial. Karena itu, adakalanya masyarakat menghadapi berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri atau sulit ditemukan solusinya, misalnya masalah pembagian waris, sengketa tanah, masalah keluarga, dan masalah-masalah sosial yang lainnya.

Upaya untuk menemukan solusi atas masalah sosial tersebut, maka jalan terbaik yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi dan meminta solusi kepada para alim ulama, alasannya yaitu: *Pertama* ulama lebih mengetahui hukum Islam, sehingga dapat menemukan solusi secara islami atas berbagai masalah yang dihadapi. *Kedua*, ulama lebih mudah ditemui secara langsung dan selalu siap kapanpun jika dibutuhkan oleh masyarakat. *Ketiga*, terkadang masyarakat 'enggan' mengadukan permasalahan kepada pemerintah karena mereka harus mengikuti alur birokrasi yang berbelit memakan waktu yang cukup lama, bahkan seringkali harus mengeluarkan biaya, berbeda jika mereka mendatangi ulama, permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan lebih mudah diselesaikan.

Enterpreneurship

Masyarakat melihat bahwa pendidikan yang dibangun oleh ulama lebih terbuka bagi seluruh kalangan, tidak melihat kaya maupun miskin. Masyarakat memandang bahwa pendidikan di pesantren lebih menekankan pada pendidikan karakter yang bersumber pada kitab-kitab klasik. Pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan suatu entitas tersendiri yang memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat yang mandiri dan agamis. Secara umum masyarakat memandang bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren pada masa sekarang lebih ditekankan pada perpaduan pendidikan keagamaan dan umum, bahkan telah terintegrasi dengan memberikan pembekalan keterampilan bagi peserta didik dalam bentuk kewirausahaan dan *life skill*. (Wawancara, US, 2019)

Oleh karena itu, kemandirian ekonomi merupakan hal yang seharusnya dimiliki oleh para ulama. Bagi seorang ulama waktu yang dimilikinya terfokus untuk memberikan pengajaran agama kepada masyarakat. Pada posisi ini seorang ulama harus memenuhi kebutuhan ekonomi untuk keluarganya. Karena itu, waktu dan aktifitas ulama seperti itu, sangat jarang ditemukan seorang ulama yang memiliki profesi sebagai seorang pegawai, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta. Karena hal tersebut, seorang ulama dituntut untuk memiliki kemandirian ekonomi.

Masyarakat berpandangan bahwa banyak para ulama yang memiliki mata pencaharian sebagai seorang pengusaha. Mereka berhasil dan sukses dalam pengembangan usaha ekonominya tersebut, usaha yang mereka jalani bahkan ada yang menembus pasar nasional dan internasional sehingga tidak saja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat di sekitarnya pun dapat diberdayakan secara ekonomi, dan tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ulama tecermin dari ulama yang memiliki modal seperti pesantren dan lembaga ekonomi. Lembaga tersebut dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Ada empat kriteria terkait ulama yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, ulama yang memiliki pesantren dan lembaga ekonomi. Kedua, ulama yang memiliki pesantren tetapi tidak memiliki lembaga usaha. Ketiga, ulama yang tidak memiliki pesantren tetapi memiliki lembaga usaha. Keempat, ulama yang tidak memiliki pesantren dan tidak memiliki lembaga usaha.

Selanjutnya, terkait dengan transfer sosial modal ulama merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ulama di Pondok Pesantren Al-Amin Kota Tasikmalaya. Langkah-langkah yang dilakukannya dengan pengembangan potensi warga masyarakat agar bisa menjadi mandiri secara ekonomi. Praktik pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menitikberatkan pada pembinaan dan perbaikan mental orang-orang miskin agar bisa keluar dari jerat kemiskinan dengan menumbuhkan sikap optimisme dalam menghadapi kehidupan sehingga dapat meningkatkan etos kerja mereka agar bisa lebih kreatif dalam berusaha.

Praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ulama merupakan proses melipatgandakan kekuatan modal yang diakumulasi dalam lingkungan sosial, dan memungkinkan terjadinya proses interaksi antara orang yang ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan. Dengan modal pengetahuan agama dan ekonomi yang dimiliki, ulama merupakan pemegang otoritas keagamaan dalam struktur sosial masyarakat Islam. Dengan demikian, dalam konteks pengentasan kemiskinan ulama melakukan transfer modal antar agen atau antar individu, sehingga akumulasi modal yang dimiliki oleh ulama semakin mengokohkan posisi ulama itu sendiri.



BIBLIOGRAFI

- Adawiah, Wardatul. Hadi Dharmawan, Arya. Sunito, Setyawan. 2022. "Ekomodernitas Islam: Kepemimpinan, Mobilisasi dan Gerakan Lingkungan Hidup di Dua Pesantren di Jawa Barat." *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 2: 197-217. <https://doi.org/10.14421/jsa.2022.162.04>.
- Azra, Azyumardi. 1998. *Esai-essai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Burhanudin, Jajat. 2003. *Transformasi Otoritas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. 2013. *Memelihara Umat-Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Esposito, John L. (ed.6). 2002 *Eksiklopedi Oxford*. Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan.
- Farid, Miftah. 2003. "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia." *Jurnal Siositeknologi* 19, no. 2: 197.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker*, Source: Comparative Studies in Society and History 2, Published by: Cambridge University Press.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Humphrey, Stephen. 1999. *Islamic History: A Frame Work for Inquiry*. London: I.B.Tauris.

- Jannah, Hasanatul. (2015). "Kyai Perubahan Sosial dan Dinamika Politik kekuasaan." *Jurnal Fikrah* 3, no. 1 : 166-167.
- Kahmad, Dadang. 2006. *Sosiologi Agama, Bandung*: Rosda Karya, 2006.
- Khalid, Adeeb. 2014. "Ulama and the State in Uzbekistan." *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 : 533. <https://doi.org/10.1163/15685314-04205003>.
- Martin, C. Richard. (ed 1-2). 2004. *Encyclopedia of Islam and the moslem world*. USA: Macmillan Reference, Thomson Gale.
- Mostarom, Tuty Raihanah. 2014. "The Singapore Ulama: Religious Agency in the Context of a Strong State." *Source. Asian Journal of Social Science* 42, no. 5: 563. <https://doi.org/10.1163/15685314-04205005>.
- Nasution, Darwis. 2017. "Kiyai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional" *Jurnal Sosiohumaniora* 19, no. 2: 184. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.10346>
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*, Bandung: Mizan.
- Nasution, Harun. 2002. (ed. 3), *Ensiklopedi Islam*, Jil III, Jakarta: Djambatan.
- Ousman Ramadane, Zakaria. 2014. Somalia: "State Failure, Poverty and Terrorism.", *Source: Counter Terrorist Trends and Analyses* 6, no.7: 13-16.
- Setianto, Yudi. 2022. "Tranformasi Golongan Abangan Menuju Gerakan Radikal Keagamaan (Dinamika Radikalisme Islam dalam Masyarakat Abangan di Solo, Jawa Tengah." *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 2: 219-230. <https://doi.org/10.14421/jsa.2022.162.05>.
- Shihab, Quraish. 2000. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Shodik, Ramadlan. Fajar, Muhammad. 2013. "Revitalisasi Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan di Madura Melalui Peran Kyai Dan Pesantren." *Jurnal Karsa, STAIN Pamekasan* 21, no.1: 81.
- Shokheh, Mukhamad. 2011. "Tradisi Intelektual Ulama Jawa: "Sejarah Sosial Intelektual Pemikiran Keislaman Kiai Shaleh Darat." *Jurnal Paramita* 2, no. 2 :151.
- Sudarma, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Jakarta: Salemba Medika.
- Verter, Bradford. 2003. "*Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu*" *Sociological Theory*.
- Zulkifli. 2013. "The Ulama In Indonesia Between Religious Authority and Symbolic Power." *Jurnal MIQOT*, 37: 180. <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>
- Zulkifli. 2018. *Menuju Teori Praktik Ulama*. Ciputat: Haja Mandiri.

Wawancara

Wawancara penelitian dengan AR, tanggal 16 November 2019

Wawancara penelitian dengan ES, tanggal 16 November 2019

Wawancara penelitian dengan HP, tanggal 24 Februari 2019

Wawancara penelitian dengan KH. WN, tanggal 2 Januari 2019

Wawancara penelitian dengan MS, tanggal 10 November 2019

Wawancara penelitian dengan NS, tanggal 10 Oktober 2019

Wawancara penelitian dengan RZ, tanggal 2 Januari 2019

Wawancara penelitian dengan YA, tanggal 15 Januari 2019

Wawancara penelitian dengan US, tanggal 24 Februari 2019



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

